

RESEARCH ARTICLE

Pengaruh Tingkat Aglomerasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2023

Siska Agustin^{1*}, Siska Yuli Anita², Taufiqur Rahman³^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarami, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.Corresponding Email: aguustinsiska561@gmail.com^{1*}**Histori Artikel:**

Dikirim 2 September 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 September 2025; Diterima 10 November 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Agustin, S., Anita, S. Y., & Rahman, T. (2025). Pengaruh Tingkat Aglomerasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2023. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5913-5921. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.5480>.

Abstrak

Ketimpangan pembangunan sebagai masalah mendasar dalam pembangunan diupayakan untuk terus ditekan serendah mungkin. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemerataan pembangunan di daerah dan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat aglomerasi industri dan jumlah tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dalam perspektif ekonomi Islam selama periode 2020 - 2023. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan berupa data sekunder dalam bentuk data panel dengan menggabungkan antara data time series dan cross section. Data time series pada penelitian ini menggunakan 4 tahun terakhir yakni 2020 – 2023, sedangkan cross section pada penelitian ini menggunakan 10 Provinsi yang ada di pulau Sumatera. Data diolah dengan analisis data panel dan dengan regresi Random Effect Model menggunakan aplikasi Eviews 10. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat aglomerasi industri di Pulau Sumatera memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Sedangkan, jumlah tenaga kerja menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, namun juga tidak signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja belum tentu berkontribusi secara langsung terhadap pemerataan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera. Secara simultan, kedua variabel ini berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa faktor aglomerasi industri dan jumlah tenaga kerja secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan tersebut. Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan distribusi kekayaan yang adil sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Aglomerasi Industri; Tenaga Kerja; Ketimpangan Pendapatan.

Abstract

Inequality in development is a fundamental issue that needs to be continuously minimized as much as possible. Efforts that can be made include equitable development across regions and creating as many job opportunities as possible. This research aims to analyze the impact of industrial agglomeration levels and the number of workers on income inequality in Sumatra Island from the perspective of Islamic economics during the period of 2020 - 2023. This type of research is quantitative, utilizing secondary data in the form of panel data by combining time series and cross-sectional data. The time series data in this study covers the last four years, namely 2020 - 2023, while the cross-sectional data includes 10 provinces on Sumatra Island. The data is processed using panel data analysis and Random Effect Model regression with Eviews 10 software. The analysis results indicate that the level of industrial agglomeration in Sumatra Island has a positive effect on income inequality; however, this effect is not statistically significant. Meanwhile, the number of workers shows a negative effect on income inequality, but it is also not statistically significant, indicating that an increase in the number of workers does not necessarily contribute directly to income distribution across all provinces in Sumatra. Simultaneously, both variables have a significant effect on income inequality, suggesting that the factors of industrial agglomeration and the number of workers together influence this inequality. From the perspective of Islamic economics, these results emphasize the importance of applying principles of social justice such as zakat, infak, sadaqah, waqf, and fair wealth distribution as strategies to reduce income inequality.

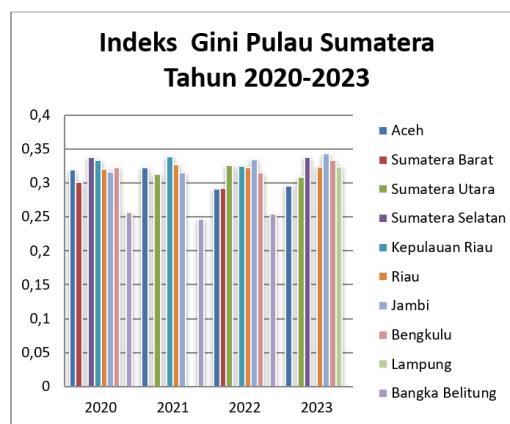
Keyword: Industrial Agglomeration; Labor; Income Inequality.

RESEARCH ARTICLE

1. Pendahuluan

Perekonomian suatu wilayah dikatakan berhasil apabila masyarakatnya dapat menikmati hidup yang sejahtera sebagai dampak positif dari kegiatan ekonominya. Kemajuan dalam pembangunan ekonomi salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh wilayah tersebut, yang dapat dilihat dari pertambahan barang produksi, meningkatnya produksi barang modal, bertambahnya jumlah sekolah, berkembangnya infrastruktur, serta bertambahnya sektor jasa. Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukan. Salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan di suatu wilayah adalah pendapatan per kapita. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah, yaitu: 1) Pendapatan nasional riil; 2) Pendapatan riil per kapita; 3) Kesejahteraan penduduk; dan 4) Tenaga kerja dan pengangguran (Moh Ikhwan, "Indikator-Indikator Makro Ekonomi," Edisi 2, Jakarta: 1995). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menghitung ketimpangan pendapatan adalah tingkat indeks Gini di setiap provinsi di Pulau Sumatera.

Ketimpangan pembangunan, sebagai masalah mendasar dalam pembangunan, diupayakan untuk terus ditekan serendah mungkin. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi, harus terus mengupayakannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemerataan pembangunan di daerah dan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Pemerataan pembangunan akan mengurangi ketimpangan antar daerah dan mencegah terjadinya pembagian wilayah antara yang maju dan yang tertinggal (Sjafrizal, 2008). Banyak faktor yang menentukan tinggi rendahnya perekonomian suatu wilayah. Perekonomian suatu wilayah bisa dilihat dari PDRB yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Masli (2007), yang menyatakan bahwa perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan melihat PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB didapatkan dengan dua cara, yaitu menurut lapangan usaha dan penggunaan. Menurut Karlita dan Yusuf (2013), ada banyak hal yang dapat mempengaruhi nilai PDRB, antara lain tenaga kerja, investasi, dan ekspor (Lili Masli, 2016). Dilihat dari gambar Indeks Gini di setiap provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020–2023, dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 1. Indeks Gini di Pulau Sumatera Tahun 2020-2023

Gambar 1 menunjukkan variasi ketimpangan pendapatan di berbagai provinsi. Secara umum, nilai indeks Gini untuk sebagian besar provinsi menunjukkan fluktuasi selama periode tersebut. Provinsi Aceh dan Sumatera Utara memiliki nilai indeks Gini yang lebih tinggi, mencerminkan ketimpangan pendapatan yang signifikan, terutama pada tahun 2021. Sebaliknya, provinsi seperti Lampung dan Bengkulu menunjukkan indeks Gini yang lebih rendah, menandakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Tren dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2020, beberapa provinsi seperti Riau dan Sumatera Utara memiliki indeks Gini yang stabil. Namun, tahun 2021 menjadi momen kritis dengan meningkatnya

RESEARCH ARTICLE

tingkat ketimpangan di hampir semua provinsi. Menariknya, pada tahun 2023, sebagian besar provinsi menunjukkan penurunan indeks Gini, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan. Penurunan ini dapat menunjukkan upaya yang lebih baik dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di wilayah tersebut. Secara umum, grafik ini mencerminkan dinamika ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, di mana sebagian provinsi menunjukkan peningkatan, sementara provinsi lain masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal ketimpangan pendapatan. Provinsi Lampung menempati posisi yang menarik dalam grafik tersebut. Dalam periode yang dibahas, nilai indeks Gini Lampung relatif stabil, dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Lampung tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang sangat mencolok. Salah satu penyebab stabilitas ini mungkin terkait dengan karakteristik ekonomi Lampung yang didominasi oleh sektor pertanian. Sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, terutama pertanian, pendapatan di Lampung dapat lebih merata antara petani dan pelaku usaha kecil. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah juga memperbaiki aksesibilitas dan kesempatan kerja, yang dapat membantu mengurangi ketimpangan. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, industri berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan agar dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan tambahan lapangan usaha, meningkatkan penghasilan penduduk, meminimalkan masyarakat yang miskin, serta mendorong pembangunan daerah. Maka, sektor industri mampu dinyatakan sebagai salah satu sektor yang menyumbang PDRB di suatu negara (Harahap *et al.*, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan di Pulau Sumatera pada tahun 2020-2023 berfluktuasi. Sektor industri yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha, yaitu Transportasi dan Pergudangan, mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,38 persen pada tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara.

Struktur ekonomi di Pulau Sumatera secara spasial pada tahun 2023 didominasi oleh beberapa provinsi besar. Tiga besar di antaranya adalah Provinsi Sumatera Utara yang berkontribusi sebesar 23,25 persen, Provinsi Riau sebesar 22,71 persen, dan Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi sebesar 13,92 persen. Sementara kontribusi terendah yaitu Provinsi Bengkulu dengan kontribusi sebesar 2,14 persen. Pengukuran hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tidak cukup apabila hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu faktor non-ekonomi, salah satunya adalah faktor sumber daya manusia (SDM) dan ketenagakerjaan. Jumlah tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Daerah dengan tingkat tenaga kerja yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, karena tenaga kerja yang produktif dapat meningkatkan output dan pendapatan (Todaro & Smith, 2015 dalam Yulianita, Anna, 2024). Jumlah tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2020-2023 sangat berfluktuatif. Di Provinsi Riau, jumlah tenaga kerja pada tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan di beberapa provinsi mengalami penurunan jumlah tenaga kerja seperti Provinsi Sumatera Utara dan Lampung. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, artikel ilmiah ini membahas mengenai faktor-faktor sumber daya manusia yang berupa tingkat aglomerasi dan jumlah tenaga kerja, serta apakah faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Untuk itu, peneliti memberi judul artikel ilmiah ini: "Analisis Pengaruh Tingkat Aglomerasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2023."

2. Tinjauan Pustaka

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu fundamental dalam ekonomi yang telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor struktural dan kebijakan pembangunan yang tidak merata. Menurut Kuznets (1955), ketimpangan pendapatan berhubungan dengan tahap-tahap perkembangan ekonomi

RESEARCH ARTICLE

suatu negara. Ia mengemukakan bahwa pada awal perkembangan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, tetapi seiring berjalanannya waktu, ketimpangan tersebut akan menurun seiring dengan pemerataan pendapatan. Di sisi lain, Sjafrizal (2008) menjelaskan bahwa ketimpangan antar daerah di Indonesia masih cukup tinggi, terutama antara daerah maju dan tertinggal, yang dipengaruhi oleh faktor distribusi sumber daya yang tidak merata. Aglomerasi industri merupakan salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut Glaeser *et al.* (1992), aglomerasi industri dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu, namun pada saat yang sama, dapat memperburuk ketimpangan antara daerah yang memiliki konsentrasi industri dengan daerah yang tidak. Hal ini terjadi karena konsentrasi industri yang tinggi dapat menciptakan ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, sehingga daerah lain yang tidak memiliki akses atau sumber daya untuk industri tersebut menjadi tertinggal. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Yuniarti (2020) menunjukkan bahwa aglomerasi industri memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, namun pengaruh tersebut bervariasi tergantung pada tingkat perkembangan industri di masing-masing daerah. Selain itu, jumlah tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam pembentukan ketimpangan pendapatan. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang tinggi cenderung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun peningkatan tenaga kerja tanpa disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Penelitian oleh Zahrotussolichah (2023) juga menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja yang tinggi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, tetapi efeknya tidak selalu signifikan secara statistik, tergantung pada sektor-sektor pekerjaan yang tersedia dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan pendapatan dapat dikurangi melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat dan mengurangi jurang sosial antara kelompok kaya dan miskin. Sejalan dengan itu, beberapa peneliti seperti Sodik dan Iskandar (2007) mengemukakan bahwa sistem distribusi kekayaan dalam Islam memberikan solusi untuk mengatasi ketimpangan, dengan memberikan kewajiban bagi individu yang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti aglomerasi industri dan jumlah tenaga kerja. Namun, faktor-faktor ini juga dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diterapkan di masing-masing daerah, serta upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan kesempatan kerja. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi alternatif untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan ini, melalui kebijakan yang lebih mengutamakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

3. Metode Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk menaksir parameter. Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik data-data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Untuk itu, peneliti menggunakan data panel. Metode ini lebih sesuai untuk mempelajari dan menguji model perilaku (behavioral model) yang kompleks dibandingkan dengan model cross-section maupun time series. Persamaan untuk model regresi data panel yang menggunakan data cross-section dan time series dalam melihat pengaruh antara variabel dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

RESEARCH ARTICLE

Keterangan :

Y = Ketimpangan Pendapatan (variable dependen)

a = Konstanta

X1 = Aglomerasi Industri (Variabel independen 1)

X2 = Jumlah Tenaga Kerja (Variabel independen 2)

 $\beta_{1,2,3}$ = Besarnya koefisien regresi dari setiap variabel bebas

e = Error term

t = Waktu (time)

i = kota/kabupaten/provinsi

4. Hasil dan Pembahasan**4.1 Hasil**

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.289332	(3,10)	0.0015
Cross-section Chi-square	23.657599	3	0.0000

Tabel 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	0.972567	2	0.6149

Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa nilai dari probabilitas cross-section F sebesar 0,0015. Pada tabel 3 memperlihatkan untuk probabilitas cross section random sebesar 0,6149. Oleh karena itu, dari hasil pengujian kesesuaian model diperoleh bahwa *Random Effect Model* adalah model yang digunakan pada penelitian.

Tabel 3. Hasil Estimasi Model Random Effect

Variable	Coefficien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Aglomerasi Industri (X1)	0.001167	0.000715	1.631389	0.1268
Jumlah Tenaga Kerja (X2)	-0.000351	0.000171	-2.047094	0.0614
C	0.261796	0.053394	4.903067	0.0003

Berdasarkan hasil estimasi model *Random Effect*, didapatkan nilai koefisien estimasi untuk masing-masing variabel independen beserta signifikannya. Model juga menghasilkan nilai R Square sebesar 0.231209 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0.112933 yang menjelaskan seberapa baik model menjelaskan variasi data.

4.2 Pembahasan

Nilai R-squared sebesar 0,231209 menunjukkan bahwa sekitar 23,12% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel aglomerasi industri dan jumlah tenaga kerja dalam model ini. Sementara nilai Adjusted R-squared sebesar 0,112933 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel dalam model, penjelasan terhadap variasi ketimpangan pendapatan menjadi sedikit lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa meskipun model ini memberikan gambaran dasar tentang hubungan antara kedua variabel tersebut terhadap ketimpangan, sebagian besar variasinya (sekitar 76,88%) masih dipengaruhi oleh faktor lain yang belum dimasukkan dalam model ini. Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien variabel aglomerasi industri sebesar 0,001167 dan nilai p-nya lebih besar dari 0,05, yang berarti aglomerasi industri berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, namun pengaruhnya tidak

RESEARCH ARTICLE

signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa meskipun aglomerasi industri meningkat sebesar 1%, ketimpangan pendapatan hanya meningkat sebesar 0,001167. Penelitian Aditya Husen (2024) mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa aglomerasi industri memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, meskipun berbeda dengan penelitian Farida Rahmawati dan Refsy Ayu Yuniarti (2020) yang menemukan bahwa aglomerasi industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, variabel jumlah tenaga kerja memiliki koefisien regresi sebesar -0,000351, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja cenderung berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, namun pengaruh tersebut juga tidak signifikan secara statistik karena nilai p-nya lebih besar dari 0,05. Artinya, ketika jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 1%, ketimpangan pendapatan cenderung menurun sebesar -0,000351. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sinta Zahrotussolichah (2023) yang menyatakan bahwa angkatan kerja berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, berbeda dengan penelitian Aprilia Nilasari dan Rizky Amelia (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Hasil uji F simultan menunjukkan nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0,503539, yang lebih besar dari 0,05, dengan F-statistik sebesar 0,723611. Ini menunjukkan bahwa aglomerasi industri dan jumlah tenaga kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Penelitian Vivilia dkk (2022) juga mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa aglomerasi industri dan jumlah tenaga kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa variabel aglomerasi industri tidak memiliki pengaruh langsung terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan distribusi kekayaan yang adil. Prinsip-prinsip ini dapat mendorong pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Beberapa konsep dalam Islam yang dapat membantu mengatasi ketimpangan pendapatan antara lain kewajiban membayar zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, hadiah, dan hibah (Sodiq, 2016). Allah berfirman: "وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (QS. Al-Anbiya: 107), yang artinya: "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Firman ini menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian "Analisis Pengaruh Tingkat Aglomerasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2023" adalah sebagai berikut: Pertama, aglomerasi industri menunjukkan pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi industri yang lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga keberadaan industri di Sumatera belum cukup merata. Kedua, jumlah tenaga kerja menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, tetapi juga tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja tidak secara konsisten berkontribusi terhadap pengurangan maupun peningkatan ketimpangan pendapatan antar provinsi dalam data yang dianalisis. Kemungkinan besar, kenaikan jumlah tenaga kerja tidak diiringi oleh peningkatan produktivitas atau pendapatan per kapita yang seimbang di seluruh wilayah. Ketiga, secara simultan, aglomerasi industri dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, diperlukan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial, seperti zakat, sedekah, dan distribusi kekayaan yang adil. Dalam Islam, ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi, yang dapat mendorong pemerataan kesempatan ekonomi bagi semua anggota masyarakat. Beberapa konsep dalam Islam yang dapat

RESEARCH ARTICLE

membantu mengatasi ketimpangan pendapatan di antaranya adalah kewajiban membayar zakat, infaq, sedekah, wakaf, warisan, hadiah, dan hibah.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian. Dosen/peneliti yang tercantum dalam daftar penulis tidak perlu diberikan ucapan terima kasih di bagian ini.

7. Referensi

- Agustin, E., Sasana, H., Jalunggono, G., Ekonomi, F., Tidar, U., Magelang, K., & Tengah, J. (2021). The effect of industry agglomeration, workforce, and wage level of workers on economic growth of districts/cities in Central Java Province. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(1), 60–69.
- Amanda, A. Z. (2024). Skripsi Anggun Zaskya Amanda NPM: 2051010216.
- Anggraini, V., & Bahtiar, M. Y. (2024). Analisis pengaruh aglomerasi industri, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2018–2022. 5(1), 162–180.
- Batari Saraswati Karlita. (2018). Sektor industri Kota Semarang tahun 1993-2010. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 34–35.
- BPS. (2020). *Indeks Gini provinsi-provinsi di Pulau Sumatera*.
- BPS. (2020). *Jumlah tenaga kerja industri skala mikro dan kecil menurut provinsi (orang) tahun 2020-2023*.
- BPS. (2020). *Kontribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut provinsi*.
- Fattah, S., Suhab, S., & Fadillah, A. N. (2022). Determinan ketimpangan pendapatan masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, 1(1), 108–125.
- Glaeser, E., Kallal, H. D., Scheinkman, J. A., & Shleifer, A. (1992). Growth in cities. *Journal of Political Economy*, 100(6), 1126–1152.
- Hadju, I. I., Masinambow, V. A., & Maramis, M. T. (2021). Analisis ketimpangan pembangunan wilayah di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(01), 110–120.
- Husen, A. (2024). Pengaruh aglomerasi industri, indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IPTIK) terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan timur Indonesia perspektif ekonomi Islam tahun 2018–2022. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/36690>.
- Ikhsan, M. (1995). *Indikator-indikator makro ekonomi* (Edisi 2). Jakarta.

RESEARCH ARTICLE

- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (Cetakan ke-17). Jakarta: Rajawali Pers.
- Karlita, B. S., & Yusuf, E. (2013). Investasi, tenaga kerja, dan ekspor terhadap PDRB sektor industri. Semarang.
- Krugman, P. (1998). Space: The final frontier. *Journal of Economic Perspectives*, 12(2), 161–174.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Liow, M. O., Naukoko, A., & Wensy, R. (2022). Pengaruh jumlah penduduk dan investasi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(2), 140.
- Masli, L. (2007). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional antar kabupaten/kota. Jakarta.
- Masli, L. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. 32, 1–23.
- Nababan, T. J. A., & Robertus, M. H. (2024). Pengaruh aglomerasi, jumlah penduduk, dana perimbangan, dan belanja pemerintah terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018–2022. *Diponegoro Journal of Economics*, 13(2), 41–51. <https://doi.org/10.14710/djoe.43411>.
- Nilasari, A., & Amelia, R. (2022). Pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2(2), 171–182.
- RA, H. (2015). Teori ketenagakerjaan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Rahmawati, F., & Yuniarti, R. A. (2020). Analysis of the effect of industrial agglomeration, economic growth, human development index (HDI), and open unemployment rate on regional inequality in East Java Province. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 22(1), 1–9.
- Sahal, A. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2017–2021.
- Saleh, B., & Warlina, L. (2017). Identifikasi karakteristik aglomerasi industri pengolahan di Cikarang Kabupaten Bekasi tahun 2006 dan 2013. *Jurnal Wilayah dan Kota*, 4(01), 37–53. <https://doi.org/10.34010/jwk.v4i01.2119>.
- Salsabila, W. F. (2023). Pengaruh aglomerasi industri, jumlah tenaga kerja, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2012–2021.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi* (Pertama). Baduose Media.
- Sodik, J., & Iskandar, D. (2007). Peran karakteristik regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(2), 117–129.
- Sugiyono, Dr. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

RESEARCH ARTICLE

Sun, M., Anju, R., & Batubara, S. (2021). Pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2020. *10*, 350–360.

Syah, A., Nawawi, Z. M., Daulay, A. N., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2023). The effect of industrial agglomeration, labor force, and human capital investment on economic growth in Medan City in the perspective of Islamic economics. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, *7*(1), 2140–2151.

Tsamara, A. N. (2021). Analisis pengaruh aglomerasi, infrastruktur, upah minimum, jumlah orang bekerja, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota Jawa Timur. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/187811>.

Wahyu Widayati, H., Togar Laut, L., & Destiningsih, R. (2019). Pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan dan jumlah pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 1996–2017. *Dinamic: Directory Journal of Economic*, *1*(2), 182–194.

Wulandari, D. F. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah, pembangunan manusia, dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan Indonesia. <http://repository.um.ac.id/id/eprint/262390>.

Zahrotussolichah, S. (2023). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan modal manusia terhadap ketimpangan pendapatan (Studi kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017–2022). *Repositori.Untidar.Ac.Id*.